

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat Hari Besar Keagamaan yaitu Datangnya Bulan Suci Ramadhan serta Perayaan Hari Raya Idul Fitri, dimana padamomen perayaan Hari Besar keagamaan seringkali terjadi kenaikan harga Kebutuhan bahan pokok dan penting lainnya.

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Lumajang, selama Triwulan I Tahun 2025 terjadi kenaikan IPH yang cukup tinggi yaitu pada Minggu ke 2 Maret sebesar 3.52 % yang disebabkan terjadinya kenaikan harga komoditas Cabai Rawit, Beras dan Daging Ayam Ras, dan terjadi lagi pada Minggu ke 3 Maret yaitu sebesar 3.51 % yang disebabkan oleh kenaikan komoditas Cabai Rawit, Beras dan Daging Ayam Ras.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari data IPH dari BPS Kabupaten Lumajang, komoditas beras menjadi penyumbang inflasi yang masuk dalam range 1. Permasalahan yang saat ini dihadapi terkait naiknya harga beras di Kabupaten Lumajang yaitu keterlambatan masa tanam padi, ditambah adanya elnino yang menghambat produktifitas padi di Kabupaten lumajang pada musim panen sebelumnya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lumajang dalam rangka pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat telah melakukan langkah kongkret yaitu :

1. Melaksanakan Operasi Pasar

Dalam rangka mewujudkan pengendalian harga bahan pokok dan penting, maka Diskopindag Kabupaten Lumajang menggelar Operasi Pasar dengan komoditas minyak goreng, beras, gula dan telur ayam ras yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu pada tanggal 24.25.26.27 Februari di Kantor Kelurahan, tanggal 3.4.5.13.14.15.16.17 Maret di alun-alun Lumajang, dan tanggal 20.24.25.25.26 Maret di beberapa Kecamatan

2. Gerakan Pangan Murah (GPM)

Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Lumajang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 13 Februari, 20 Maret, 24 Maret 2025.

Pada pelaksanaan GPM terdapat beberapa komoditas yang dijual antara lain :

1. Beras SPHP = 8 Ton
2. Beras Nagayana = 3 Ton
3. Gula Pasir = 1 Ton
4. Telur Ayam Ras = 1 Ton
5. Bawang Merah = 5 Kwintal

- BawangPutih = 1,5Kwintal
7. CabeMerahBesar = 70 kg
8. CabeRawitMerah = 2 Kwintaldan AnekaProdukOlahan UMKM

3. MenjagaPasokanBahanKebutuhanPokokdanbarangpentinglainnya

TPID Kabupaten Lumajang bersama Satgas Pangan Polri dan Kejaksaan Negeri melaksanakan Sidak harga dan stok kepasar dan distributor padatanggal 15 Januari 2025

4. Rapat Teknis TPID

Untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui TPID mengadakan Rapat High Level Meeting (HLM) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 di Ruang Rapat CC Room Diskominfo Kabupaten Lumajang. Dimana pada Rapat HLM dihadiri oleh seluruh anggota TPID, Bupati dan Forkopimda serta stakeholder lain untuk merumuskan kebijakan daerah untuk menjaga stabilitas harga, keamanan stock pangan, kelancaran distribusi serta terus memelihara komunikasi yang efektif antar stake holder.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan, pengendalian harga untuk komoditas beras terbukti membuahkan hasil, dimana memasuki bulan Maret hingga mendekati Perayaan Idul Fitri 2025 harga bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Lumajang tidak ada komoditas tertentu yang mengalami kenaikan berarti apalagi terjadi kelangkaan stok.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari hasil pertemuan High Level Meeting tersebut disepakati bersama dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pejabat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember untuk membuat rekomendasi yang akan dilakukan OPD untuk menghadapi HKBN yaitu menjelang Peryaan Idul Fitri Tahun 2025, Rekomendasi yang disampaikan adalah :

1. Mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan utama maupun barang penting lainnya, serta memastikan ketersediaan stok dan pasokannya, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun stok yang berada di gudang, pasar tradisional dan pasar ritel modern serta di tingkat produsen.
2. Melakukan sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah korektifatas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan, gangguan distribusi, maupun penimbunan.
3. Mengintensifkan serta optimalisasi intervensi pasar melalui Operasi Pasar maupun Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan melibatkan beberapa stakeholder Serta memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan termasuk pemantauan pada wilayah-wilayah rawan kemacetan serta memprioritaskan perjalanan kendaraan pengangkut komoditas pangan, bekerjasama dengan Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
4. Sinergitas dan kolaborasi semua *Stakeholder* untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan terkendali dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan
- 6.

sampai Idul Fitri.

5. Memberikan himbauan kepada masyarakat misalnya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, media sosial dan iklan layanan masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja.